

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kajian Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun beberapa hasil studi empiris terdahulu yang berkaitan dengan tesis ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Nistyantara, dkk (2016), dengan judul manajemen kolaborasi dalam rangka resolusi konflik di Taman Nasional Kelimutu. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *Stakeholders* yang termasuk kategori *subjects* terdiri dari masyarakat Saga, Wologai Tengah dan petani kopi dalam kawasan, memerlukan pemberdayaan agar terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam pengelolaan TNKL. *Stakeholders* yang termasuk kategori *key players* terdiri dari BTNKL, lembaga adat, Kepala Desa, Disbudpar dan Tananua Flores, perlu dilibatkan sebagai mitra dan perlu untuk mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan TNKL. *Stakeholders* yang termasuk kategori *context setters* terdiri dari BAPPEDA, Dishutbun, Unflor, serta *Swisscontact*, perlu dikelola untuk dimintai saran pendapat (konsultasi) ataupun hanya sekedar penyampaian ijin dan pemberitahuan akan dilaksanakannya suatu kegiatan.

Strategi yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan *Collaborative Management* dengan mengikuti rangkaian langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: a) pertemuan antar stakeholders inti yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan

penyuluhan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; b) pembentukan wadah/forum stakeholders yang dilanjutkan dengan pembuatan aturan/ kesepakatan stakeholders dan sosialisasi program. Dalam forum stakeholders yang terbentuk, belum dibangun kesepakatan mengenai tingkat partisipasi masing-masing stakeholders pada setiap tahapan pengelolaan sekaligus menentukan penanggung jawab kegiatannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2015), dengan judul pengelolaan dana sharing produksi kayu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan (Studi tentang Penerapan *Collaborative Management* pada Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif dana sharing produksi kayu antara Perum Perhutani Cepu dengan LMDH sudah sesuai dengan konsep *collaborative management*. Meskipun dalam prosesnya mengalami berbagai hambatan, namun tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan. Alokasi sharing produksi kayu yang dilakukan oleh LMDH sebagian besar sudah berdasarkan kesepakatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat desa hutan khususnya pengurus LMDH mulai meningkat. *Collaborative Management* juga memberi banyak manfaat yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya faktor pendukung dari dalam maupun luar menjadi motivasi tersendiri dalam mengelola *sharing* produksi kayu agar lebih optimal.

Faktor yang menghambat baik dari dalam atau luar akan menjadi bahan evaluasi terutama bagi para pemangku kepentingan untuk perbaikan.

Selanjutnya penelitian Kassa, *et.al.* (2012) dengan judul *co-management* untuk menginisiasi penyelesaian konflik di Taman Nasional Lore Lindu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan utama stakeholder yang mengakibatkan terjadinya konflik di TNLL adalah pemanfaatan lahan adat yang terdapat di dalam kawasan taman nasional, keinginan untuk rekonstruksi tapal batas, pengambilan rotan dalam kawasan, kegiatan illegal logging, dan perburuan satwa yang dilindungi. Menurutny faktor kunci penentu keberhasilan *co-management* yakni: keterlibatan stakeholder, negosiasi, kejelasan batas teritori, konsensus, kejelasan hak dan tanggungjawab stakeholder, pengakuan hak masyarakat lokal oleh BTNLL, dan penerapan sanksi adat.

Djamhur, dkk (2016), dengan judul pemodelan interpretasi struktural pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda yang berkelanjutan adalah pemerintah, wisatawan, dan perguruan tinggi lewat pengembangan wisata. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan perikanan tangkap dengan membantu nelayan dalam menentukan harga perikanan, mengelola sumberdaya alam, peraturan investasi daerah dan membuat kebijakan yang konsisten dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil di Teluk Weda. Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan yaitu: membuat peraturan daerah yang dapat menunjang kegiatan, mensosialisasikan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, melakukan pelatihan yang menyangkut undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah; mempertahankan peraturan adat istiadat yang masih ada sesuai dengan pengelolaan kawasan dan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penetapan kawasan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Satria (2016), dengan judul analisis kelembagaan dan keberlanjutan Eha Laut dan Mane'e sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kinerja Eha Laut dan Mane'e dalam pengelolaan sumber daya pesisir telah efektif dan berjalan dengan baik. Namun, ada 3 (tiga) indikator yang masih dalam manajemen tingkat rendah. Antara lain adalah tingkat keberlanjutan dinilai dalam tiga dimensi seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun dimensi yang perlu menjadi perhatian lebih adalah dimensi lingkungan.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sudana (2012), dengan judul kendala dan strategi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) untuk pencapaian *MDGs* dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia (Studi: Das Bengawan Solo hilir-Bojonegoro). Hasil penelitian menunjukkan, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan PSDAT terhadap *MDGs* adalah sistem pengelolaan dan pengawasan dengan paradigma *bottom-up approach* belum terlaksana dengan optimal. Kemudian strategi PSDAT terhadap *MDGs*,

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan PSDAT dalam aspek pertanian, transportasi, perikanan, pariwisata, industri dan pemahaman kesetaraan gender. Sedangkan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan PSDAT dalam aspek STBM dan pemahaman kesetaraan gender. Dimana untuk mencapai kedua tujuan tersebut dibutuhkan adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang optimal dengan paradigma *bottom-up approach*.

Kemudian penelitian Lasabuda (2013), tentang pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama ini masih jauh dari harapan. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran, mengingat kawasan ini memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas. Dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007, telah memberikan makna strategis sekaligus tantangan bagi implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal yang paling penting untuk menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan pembangunan adalah perlunya perubahan paradigma pembangunan. Dimana pendekatan pembangunan selama ini yang lebih berorientasi darat, harus dirubah menjadi berorientasi ke-laut, dengan lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Selain itu upaya peningkatan kualitas SDM di daerah perlu dilakukan sebagai ujung tombak

pelaksana kebijakan kelautan dan perikanan nasional. Dengan adanya *capacity building* dan kemitraan dengan berbagai pihak maka implementasi konsep pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu akan terlaksana dengan baik.

Penelitian Biasane, dkk (2016), dengan judul kebijakan pengelolaan pulau kecil perbatasan berbasis geopolitik, daya dukung ekonomi dan lingkungan (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor potensial untuk dikembangkan di Kepulauan Sangihe adalah perikanan tangkap dan komoditas perkebunan. Penelitian ini melakukan analisis untuk mengembangkan perikanan tangkap pada ikan layang (*Decapterus sp.*), *trveallies* (*Selar spp.*), tuna kecil (*Euthynus sp.*), Skipjack tuna (*Katsuwonus pelamis*), hiu (*Charcarias sp.*) dan tuna (*Thunnus albacares*). Produksi berkelanjutan rata-rata pada 20 tahun (1988-2007) ikan layang adalah 1746,3 ton/tahun, bobara adalah 194,1 ton/tahun, hiu adalah 148,4 ton/tahun, ikan tuna cakalang adalah 315,6 ton/tahun, tuna adalah 152 ton/tahun, dan tuna kecil adalah 1073,2 ton/tahun pada periode yang sama. Prioritas kebijakan pulau kecil perbatasan adalah: (1) pengembangan perikanan tangkap, kelapa dan pala real, (2) demarkasi dan delimitasi batas negara, (3) mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil, (4) perubahan perjanjian dasar perdagangan terhadap perbatasan nilai ekonomi; dan (5) pemanfaatan optimal dan berkelanjutan sumber daya alam.

Penelitian Wahyudin (2011), dengan judul karakteristik sumberdaya pesisir dan laut kawasan Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dan lautan dengan karakteristik masing-masing, yang berdampak cukup signifikan terhadap pembentukan karakteristik wilayah tersebut. Kekhasan ini tidak hanya berlaku pada karakteristik sumberdaya alam, tetapi juga berdampak pada karakteristik sumberdaya manusia dan kelembagaan sosialnya. Pemahaman tentang karakteristik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sistem pengelolaan wilayah pesisir sangat tergantung pada ketersediaan informasi, luas wilayah, serta ketersediaan waktu dan dana untuk mengkajinya. Oleh karena itu, banyak perencana membuat skema dan pendekatan untuk mengantisipasi berbagai bias informasi yang ditimbulkan akibat keterbatasan tersebut.

Karakteristik sumberdaya pesisir dan laut Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat cukup kompleks dan memerlukan kebijakan pengelolaan spesifik agar dapat memberikan kehidupan dan penghidupan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan keterpaduan pengelolaan dan pendekatan sistem sumberdaya merupakan bentuk pengelolaan yang dinilai paling baik untuk dilakukan agar keberlanjutan ekologi, sosial dan ekonomi di kawasan tersebut dapat diwujudkan. Keterpaduan pengelolaan mencakup keterpaduan ekologis, keterpaduan sektoral, keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan stakeholders, sedangkan

pendekatan sistem di antaranya adalah sistem sumberdaya alam dan lingkungan, sistem manusia dan sistem manajemen.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prabowo, dkk (2016), dengan judul analisis aspek pengelolaan kolaboratif di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS). Penelitian dilakukan dengan cara: 1) identifikasi kebijakan kesepakatan yang berlaku, 2) analisis isi kebijakan, 3) identifikasi persepsi dan peran pemangku kepentingan; 4) analisis kualitatif terhadap persepsi dan peran pemangku kepentingan 5) analisis SWOT, dilanjutkan 6) rekomendasi penyempurnaan kelembagaan kolaborasi Mitra Kutai. Disimpulkan bahwa pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah berikut : 1) Penelitian potensi dan kondisi terkini TNK; 2) publikasi hasil penelitian serta mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media; 3) Penguatan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional; 4) Penetapan/zonasi kawasan; 5) Rekonfigurasi lembaga kolaborasi pengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak; 6) Kolaborasi dalam Pembangunan model Desa Konservasi; dan 7) Kolaborasi dalam program pemanfaatan ekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, pusat pendidikan lingkungan, taman safari dan kawasan ekowisata serta areal riset/penelitian.

Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nistyantara, dkk (2016)	Manajemen kolaborasi dalam rangka resolusi konflik Di Taman Nasional Kelimutu	Dengan menghadirkan <i>Stakeholders</i> yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu <i>subjects</i> , <i>key players</i> , dan <i>context setters</i> untuk membentuk sebuah pendekatan <i>Collaborative Management</i> sebagai strategi yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik. Melalui rangkaian langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: a) Melakukan pertemuan antar <i>stakeholders</i> inti yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan penyuluhan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; b) pembentukan wadah/forum <i>stakeholders</i> , yang dilanjutkan dengan pembuatan aturan/ kesepakatan <i>stakeholders</i> dan sosialisasi program. Dalam forum <i>stakeholders</i> yang terbentuk, perlu dibangun kesepakatan mengenai tingkat partisipasi masing-masing <i>stakeholders</i> pada setiap tahapan pengelolaan sekaligus menentukan penanggung jawab kegiatannya.
2.	Kurniawati (2015)	Pengelolaan dana sharing produksi kayu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan (Studi tentang Penerapan <i>Collaborative Management</i> pada Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif dana sharing produksi kayu antara Perum Perhutani Cepu dengan LMDH sudah sesuai dengan konsep <i>collaborative management</i> . Meskipun dalam prosesnya mengalami berbagai hambatan, namun tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan. Alokasi sharing produksi kayu yang dilakukan oleh LMDH sebagian besar sudah berdasarkan kesepakatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat desa hutan khususnya pengurus LMDH mulai meningkat. Faktor yang menghambat baik dari dalam atau luar akan menjadi bahan evaluasi terutama bagi para

			pemangku kepentingan untuk perbaikan.
3.	Kassa, et.al. (2012)	<i>Co-management</i> untuk menginisiasi penyelesaian konflik di Taman Nasional Lore Lindu	Faktor kunci penentu keberhasilan <i>co-management</i> yakni: keterlibatan stakeholder, negosiasi, kejelasan batas teritori, konsensus, kejelasan hak dan tanggungjawab stakeholder, pengakuan hak masyarakat lokal oleh BTNLL, dan penerapan sanksi adat.
4.	Djamhur, dkk (2016),.	Pemodelan interpretasi struktural pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda yang berkelanjutan adalah pemerintah, wisatawan, dan perguruan tinggi lewat pengembangan wisata. Dengan upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan perikanan tangkap dengan membantu nelayan dalam menentukan harga perikanan, mengelola sumberdaya alam, peraturan investasi daerah dan membuat kebijakan yang konsisten dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda.
5.	Satria (2016)	Analisis kelembagaan dan keberlanjutan Eha Laut dan Mane'e sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kinerja Eha Laut dan Mane'e dalam pengelolaan sumber daya pesisir telah efektif dan berjalan dengan baik. Namun, ada 3 (tiga) indikator yang masih dalam manajemen tingkat rendah. Antara lain adalah tingkat keberlanjutan dinilai dalam tiga dimensi seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun dimensi yang perlu menjadi perhatian lebih adalah dimensi lingkungan.
6.	Sudana (2012)	Kendala dan strategi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) untuk pencapaian <i>MDGs</i> dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia (Studi: Das Bengawan	Dalam strategi PSDAT terhadap <i>MDGs</i> , dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan PSDAT dalam aspek pertanian, transportasi, perikanan, pariwisata, industri dan pemahaman kesetaraan gender. Sedangkan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan PSDAT dalam aspek STBM

		Solo hilir-Bojonegoro).	dan pemahaman kesetaraan gender. Namun dalam mencapai kedua tujuan tersebut mendapati kendala terutama dalam upaya penerapan PSDAT terhadap <i>MDGs</i> adalah sistem pengelolaan dan pengawasan dengan paradigma <i>bottom-up approach</i> belum terlaksana dengan optimal.
7.	Lasabuda (2013),	Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.	Hal yang paling penting untuk menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan pembangunan adalah perlunya perubahan paradigma pembangunan. Dimana pendekatan pembangunan selama ini yang lebih berorientasi darat, juga harus lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Selain itu, dengan adanya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ke daerah (kabupaten/kota dan provinsi), maka upaya peningkatan kualitas SDM menjadi penting, terutama untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak agar implementasi konsep pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu akan terlaksana dengan baik.
8.	Biasane, dkk (2016)	Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan berbasis geopolitik, daya dukung ekonomi dan lingkungan (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kebijakan pulau kecil perbatasan adalah: (1) pengembangan perikanan tangkap, kelapa dan pala real, (2) demarkasi dan delimitasi batas negara, (3) mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil, (4) perubahan perjanjian dasar perdagangan terhadap perbatasan nilai ekonomi; dan (5) pemanfaatan optimal dan berkelanjutan sumber daya alam.
9.	Wahyudin (2011)	Karakteristik sumberdaya pesisir dan laut kawasan Teluk Palabuhanratu,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhasan yang terdapat di wilayah pesisir ini tidak hanya berlaku pada karakteristik sumberdaya alam, tetapi juga berdampak pada

		Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	<p>karakteristik sumberdaya manusia dan kelembagaan sosialnya. Karakteristik sumberdaya pesisir dan laut yang cukup kompleks sangat memerlukan kebijakan pengelolaan spesifik agar dapat memberikan kehidupan dan penghidupan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan keterpaduan pengelolaan berupa keterpaduan pengelolaan yang mencakup keterpaduan ekologis, keterpaduan sektoral, keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan stakeholders, dan juga pendekatan sistem sumberdaya seperti pendekatan sistem sumberdaya alam dan lingkungan, sistem manusia juga sistem manajemen merupakan bentuk pengelolaan yang dinilai paling baik untuk dilakukan agar keberlanjutan ekologi, sosial dan ekonomi di kawasan tersebut.</p>
10.	Prabowo, dkk (2016)	Analisis aspek pengelolaan kolaboratif di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS)	<p>Bahwa pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah berikut : 1) Penelitian potensi dan kondisi terkini TNK; 2) publikasi hasil penelitian serta mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media; 3) Penguatan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional; 4) Penetapan/zonasi kawasan; 5) Rekonfigurasi lembaga kolaborasi pengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak; 6) Kolaborasi dalam Pembangunan model Desa Konservasi; dan 7) Kolaborasi dalam program pemanfaatan ekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, pusat pendidikan lingkungan, taman safari dan kawasan ekowisata serta areal riset/penelitian.</p>

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap penelitian terdahulu, maka ditarik kesimpulan bahwa penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan berbasis *collaborative management* studi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pemanfaatan fungsi sosial-ekonomi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena peneliti meyakini belum ada penelitian yang menyerupai secara keseluruhan yang peneliti akan lakukan dengan berfokus pada pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan *Collaborative Management*.

II.2. Kerangka Teori

II.2.I Collaborative Management

Collaborative management menurut Berkes (2009), adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal melalui kemitraan pengetahuan diberbagai tingkat organisasi. Pemerintah membangun kelembagaan, menjembatani dan menyediakan forum untuk interaksi dari berbagai latar belakang pengetahuan, dan koordinasi tugas-tugas lain yang memungkinkan kerjasama, mengembangkan jaringan, mengelola sumber daya, membangun kepercayaan dan modal sosial, serta menyelesaikan konflik.

Sementara Blumenthal dan Jannink (2000) menjelaskan, bahwa *collaborative management* adalah kolaborasi antara beberapa stakeholder yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Dalam

pendekatan ini mengembangkan kerangka kerja melalui lima prinsip yaitu, partisipasi, analisis kelembagaan, penyederhanaan sumber daya alam, data spasial, dan tahapan dalam proses pengelolaan sumber daya alam.

Sedangkan menurut IUCN dalam Armitage, *et al.* (2010:3) bahwa *collaborative management* merupakan sebuah kemitraan, dimana lembaga pemerintah, masyarakat lokal, pengguna sumber daya, LSM dan stakeholder lainnya, berbagi otoritas dan tanggung jawab untuk pengelolaan wilayah tertentu. Borrini (1996) juga menjelaskan, bahwa manajemen kolaboratif adalah istilah dalam pengelolaan kawasan lindung yang mengacu pada kemitraan, dimana berbagai pemangku kepentingan setuju untuk berbagi fungsi, hak dan tanggung jawab untuk suatu kawasan atau sumber daya alam yang dilindungi. Para pemangku kepentingan tersebut antarlain tidak hanya pemerintah sebagai penanggungjawab, namun juga berbagai komunitas masyarakat, pengguna sumber daya lokal, lembaga swadaya masyarakat, otoritas tradisional, lembaga penelitian, swasta, dan lain-lain.

Sementara Pomeroy *et.al* (2010) menjelaskan, bahwa *collaborative management* adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya dalam suatu pengelolaan sumber daya alam, karena terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konsep *collaborative Management*, masyarakat lokal merupakan *partner* penting bersama-sama

dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan.

Namun Armitage (2009), berpendapat bahwa *collaborative management* adalah aktifitas membangun kepercayaan melalui kolaborasi (vertikal dan horizontal), pengembangan kelembagaan, dan pembelajaran sosial dalam meningkatkan upaya untuk mendorong pengelolaan ekosistem dan menyelesaikan dilema dilingkungan masyarakat melalui multi *stakeholder*. Demikian Buck dalam Kurniawati (2015), bahwa *Collaborative management* memiliki tiga bagian utama yaitu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Sehingga *collaborative management* akan berjalan dengan baik jika yang menjadi pemangku kepentingan semuanya terlibat dalam proses yang berkelanjutan untuk saling memahami suatu pengetahuan, kapasitas, dan kepentingan.

Sementara Muñoz, *et al*, (2010), memandang bahwa *collaborative management* sebagai pendekatan sistem sosial-ekologi yang kompleks, yang diperlukan tidak hanya untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tata kelola dan keberlanjutan oleh sumber daya pemerintahan, tetapi juga untuk membangun kapasitas belajar dan reflektivitas antara berbagai pemangku kepentingan dalam tata kolaboratif. Wu dan Liu (2013; 187) menganggap, bahwa manajemen kolaboratif dapat membantu stakeholder untuk berbagi

informasi secara efektif dan mencapai manajemen terpadu dengan berfokus pada empat elemen kunci, yaitu, "orang, informasi, prosedur, dan program, untuk memberikan konsentrasi, kemudahan dan inovasi terhadap suatu program layanan yang sedang dikerjakan. Dimana manajemen kolaboratif diwujudkan terutama pada sinergitas antar aktor, sinergitas informasi, sinergitas prosedur, dan sinergitas program.

Sedangkan Hidayat (2011:165) berpendapat bahwa adanya keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan juga *managerial skill*. Maka menjadi solusi yang rasional dalam pengelolaan sumber daya alam ialah dengan pendekatan *Collaborative Management* yang melibatkan banyak pelaku *stakeholders*. Thomson dan Perry (2006) menganggap *collaboration* ini merupakan tingkatan paling tinggi dari sebuah kerjasama karena kedalaman interaksi, komitmen, integrasi dan kompleksitasnya.

Namun Ansell dan Gash dalam Jung, dkk (2009), menjelaskan pendekatan kolaboratif dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai proses pembentukan, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengoperasikan organisasi lintas sektoral untuk mengatasi masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau satu sektor publik saja. Demikian Subarsono (2016:178) menjelaskan, bahwa kolaborasi pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau

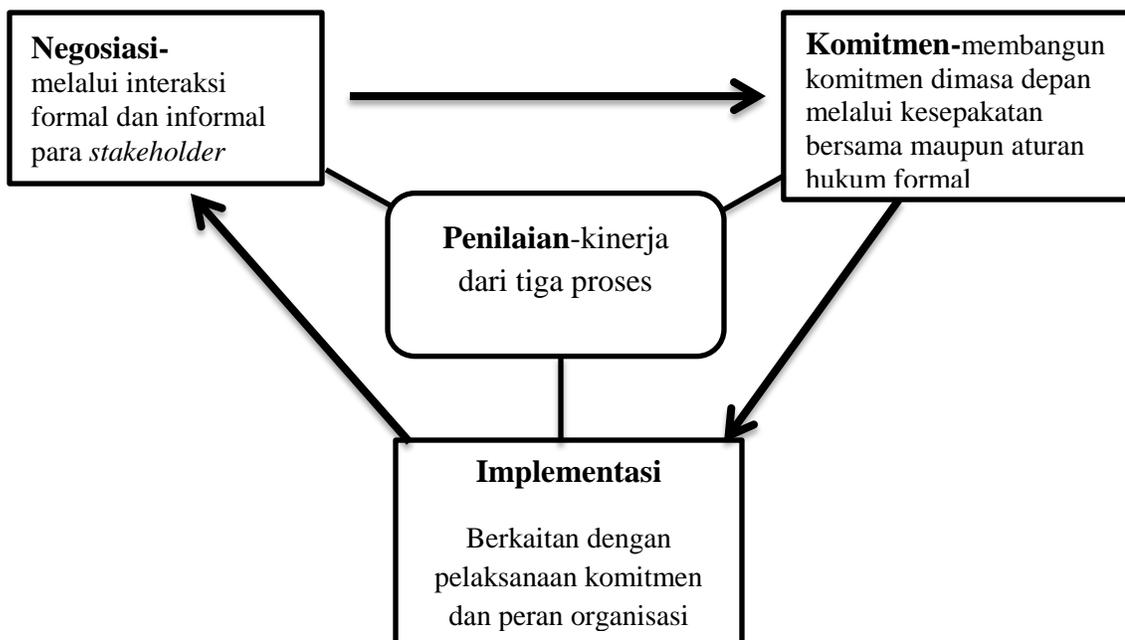
menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam proses kolaborasi ini menurut Bogason dan Musso (2005), terdapat proses penyerahan otoritas pemerintah yang sedang bekerjasama, berupa pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan bersama, berbagi sumber daya dan tanggungjawab bersama. Lebih spesifik Keraf (2010: 234-235) menjelaskan, bahwa dalam *collaboration* terutama dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup sangat menuntut semangat kerjasama dan kemitraan yang saling percaya satu sama lain. Sehingga keterbukaan diantara berbagai pihak, khususnya keterbukaan dari pihak pemerintah untuk duduk bersama dan mendengarkan pihak lain, betapun kritis dan menyakitkan, merupakan hal penting.

Namun sebenarnya menurut Hetherington (2006), bahwa pendekatan kolaborasi hadir sebagai bentuk inovasi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini cenderung menganggap pemerintah boros dan gagal untuk mewakili kepentingan masyarakat. Perlu diketahui bahwa arti penting kolaborasi ini menurut Subarsono (2016:185-186) ialah membangun kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis muatualisme*) terutama dalam melaksanakan pengelolaan dan kontribusi sumberdaya masing-masing pihak dalam setiap kegiatan. Pertimbangan bahwa setiap pihak pasti memiliki keterbatasan sumberdaya, kapasitasnya yang berbeda-beda dalam beberapa bidang, dan menyadari bahwa dalam membangun sebuah entitas dibutuhkan

berbagai sumberdaya dan keahlian yang saling mendukung, sehingga kerjasama ini mengarahkan pada integrasi sumberdaya untuk menghasilkan suatu produk kebijakan publik yang berkualitas.

Sedangkan menurut Thomson & Perry (2006), *Collabotive Management* adalah proses dimana aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama berkomitmen membuat aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka, tentang bagaimana cara para aktor memutuskan berbagai macam isu secara bersama-sama. Tentunya dalam proses tersebut melibatkan norma dan interaksi untuk mendapatkan manfaat bersama. Berikut kerangka proses kolaborasi menurut Van de Ven dalam Thomson dan Perry (2006):



Gambar 2.1 Proses kolaborasi

I. Prinsip *Collaborative Management*

Menurut Subarsono (2016: 185), untuk memulai kerjasama dalam bentuk kemitraan pada umumnya dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggungjawab dan perannya masing-masing. Menurutnya, itu dilakukan agar kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama. Adapun beberapa prinsip *collaborative*:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mendorong peningkatan efisien, produktivitas dan mensukseskan agenda pemberdayaan, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi (Subarsono, 2016: 186).

2. Pemberdayaan (empowering)

Kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan sumber daya, modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan melalui program pemberdayaan dari para *stakeholders*. Sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Nugroho (2015:124) menambahkan, bahwa pemberdayaan ini dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan profesional,

penguatan struktur sosial. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

- a. Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat.
- b. Menurut Drucker (1999) untuk menciptakan masyarakat yang makmur, terberdaya, bahagia dan sejahtera maka diperlukan produktivitas yang tinggi maka sumbernya yang primer adalah pengetahuan. Demikian menurut Subarsono (2016: 186) dengan menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (*social learning process*).

Namun demikian untuk mensukseskan prinsip diatas maka menurut Clarke (1999) dalam Supriatna (2008: 316) perlu adanya 7 pendekatan *Management Plan* terutama dalam mengelola kawasan yang dilindungi:

1. *Public Relations*, Memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai arti dan nilai dari keanekaragaman hayati khususnya resiko dan keuntungan kalau mereka mengeksploitasinya. Memberikan pengertian seperti ini tidaklah gampang karena sebagian masyarakat sangat menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut (Nugroho, 2015: 27). Demikian menurut Ife dan Tesorioro (2014: 363) aktifitas ini dimaksudkan selain untuk memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, membantu

memberikan pemahaman, semangat aksi sosial dan perlindungan lingkungan.

2. *Consultation*, Diskusi dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui permasalahan dan bagaimana cara bersama mengatasinya dengan cara *win-win solution* antara kepentingan kawasan konservasi dan ekonomi masyarakat.
3. *Derving benefits*, menurut Supriatna (2008: 387) dan Nugroho (2015: 82) dapat dicarikan jalan dimana masyarakat sekitar mungkin dapat keuntungan dari sekitar atau *buffer zone* kawasan konservasi, seperti keuntungan dari; ekowisata atau sebagai pekerja didalam atau diluar kawasan. Dalam hal ini *Revenue sharing*, Dibuatkan suatu mekanisme dimana hasil keuntungan dari pembangunan kawasan di kawasan *buffer zone* dibagi keuntungannya dengan masyarakat sekitar.
4. *Resource harvesting*, Masyarakat sekitar diizinkan memanen spesies tertentu yang tidak dilindungi di dalam kawasan. Tentu hal ini harus sangat berhati-hati karena akan mempengaruhi ekosistem, kecuali kita mampu merencanakannya dengan baik, monitor dan control yang ketat dan dalam kerangka pengelolaan pembangunan berkelanjutan.
5. *Participation in manajemen*, Representatif dari masyarakat sekitar duduk dalam *management board*, tetapi keputusannya tidak bersifat teknis melainkan lebih kepada perencanaan umum.

6. *Transfer of management*, pengelolaan kawasan konservasi juga diberikan kepada masyarakat sekitar (Nugroho, 2015: 88).

2. Manfaat *Collaborative Management*

Menurut Pinkerton dalam Armitage, *et al.* (2007), bahwa pendekatan *collaborative management* dapat memberi manfaat antaralain:

- a. *Collaborative management* untuk pembangunan ekonomi dan sosial berbasis komunitas, serta untuk mendesentralisasikan keputusan manajemen sumber daya, dan
- b. *Collaborative management* sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik melalui demokrasi partisipatif.
- c. *Collaborative management* dapat meningkatkan fungsi dari pengumpulan data, alokasi keputusan, perlindungan sumber daya dari kerusakan lingkungan, penegakkan peraturan, peningkatan perencanaan jangka panjang, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Lebih khusus menurut Hidayat (2011: 163-164), akan terjadi beberapa perubahan yang sangat mendasar ketika diterapkan *Collaborative Management*, dalam hal pengelolaan kawasan yang dilindungi yaitu:

- a. Dari satu *stakeholder* menjadi *multistakeholder*, dari *government based management* menjadi *Collaborative Management*;

- b. Dari kawasan yang semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati, menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Beban pembiayaan yang semula ditanggung pemerintah menjadi beban bersama pemerintah dan penerima manfaat;
- d. Dari *close acces* menjadi *regulated open acces*;
- e. Terwujudnya rencana peningkatan manfaat ekonomi jangka panjang dan kesepakatan multi-pihak dalam pengelolaan suatu kawasan dan terfungsikannya lembaga pengelolaan kolaboratif/multipihak untuk mendukung pengelolaan keberlanjutan suatu kawasan;
- f. Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, peran serta para pihak, efisiensi, efektivitas, dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan suatu kawasan.

3. Wajah *Collaborative Management*

Adapun beberapa wajah *Collaborative Management* menurut Berkes (2009):

- a. ***Collaborative management* sebagai membangun kelembagaan (*institution building*)**

Collaborative management dapat berkembang secara spontan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dan mengatasi konflik dengan mensinergikan upaya-upaya pengelolaan oleh *stakeholders*. Sehingga nantinya akan diperoleh strategi pengelolaan kawasan yang memungkinkan untuk diterapkan dan akuntabel. Menurut Eaton (1986) bahwa membangun kelembagaan sebagai upaya penataan, perencanaan, dan membimbing dalam mewujudkan perubahan nilai-nilai, serta memperbaiki pola-pola tindakan atau lebih tepatnya disebut sebagai inovasi dalam organisasi. Proses identifikasi yang tepat pada institusi lokal dengan membangun kekuatan mereka, atau dengan mengkaji lembaga mana yang sudah ada atau tidak bekerja atau tidak sesuai (Ostrom, 2005). Dan adanya jaringan memiliki peran besar dalam membangun lembaga tersebut. Karena kehadiran *Collaborative management* untuk membangun kelembagaan dan *partnerships* di aras lokal (Armitage, *et al*, 2010).

b. *Collaborative management* sebagai pembagian kekuasaan (*power sharing*)

Menurut Borrini dalam Berkes (2009) bahwa pemerintah membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, masyarakat, dengan memberikan platform kolaborasi bagi lembaga/sector tersebut dalam menghadapi masalah dan tantangan yang mengancam suatu

kawasan sumber daya alam. Juga yang terpenting masyarakat diikutsertakan untuk mengambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, baik untuk kepentingan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, maupun konservasi suatu sumber daya alam (Supriatna. 2008: 325).

c. *Collaborative management* sebagai kepercayaan dan modal sosial (*trust and social capital*)

Pengembangan *Collaborative Management* yang efektif tidak hanya soal membangun lembaga namun juga soal membangun kepercayaan antara pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat. Sebaliknya, menurut Ife dan Tesoriero (2014: 35, 363) bahwa modal Sosial itu penting, hadir sebagai faktor kunci, tidak hanya dalam praktek *collaborative management* tapi juga dalam semua kasus, karena merupakan “perekat” yang menyatukan masyarakat, kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial dan komunitas, serta prasyarat untuk tindakan kolektif dan pembelajaran sosial.

d. *Collaborative management* sebagai proses

Collaborative Management bekerja dalam aktifitas formal atau semi formal, dalam proses berbagi manajemen hak dan tanggung jawab.

e. *Collaborative management* sebagai pemecahan masalah (*problem solving*)

Manajemen pengambilan keputusan menyiratkan pilihan antara alternatif yang berbeda, sedangkan pemecahan masalah harus dilakukan dengan proses menghasilkan alternatif ini. Sehingga menurut Berkes (2009) diperlukan proses manajemen kolaboratif untuk membangun konsensus.

f. *Collaborative management* sebagai tata kelola Pemerintahan (*governance*)

Ide dasar dari *collaborative management* sesuai dengan gagasan-gagasan yang berkembang ialah melalui pendekatan pemerintahan sebagai penanggung jawab manajemen dan menyelenggarakan kemitraan (Kooiman, 2003).

Adapun komponen-komponen yang saling berkaitan dalam kolaboratif menurut Subarsono (2016: 202-203) yaitu:

1. *Principled engagement*, dengan *principled engagement*, pihak-pihak yang tergabung dengan konten, relasi dan tujuan yang berbeda dapat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan, meredam konflik, dan menciptakan nilai.
2. *Shared motivation*, menekankan pada elemen-elemen yang ada pada aspek yang tidak nampak dalam setiap personal, atau sering disebut modal sosial, terdiri dari empat elemen seperti rasa saling percaya (*mutual trust*), kemampuan untuk memahami dan menghormati posisi dan kepentingan satu sama lain (*mutual understanding*), dan berkomitmen untuk saling berbagi (*shared commitment*).

3. *Capacity for join action*, dengan adanya kolaborasi dalam melaksanakan suatu kebijakan atau agenda maka dapat meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama *capacity for join action* meliputi: *procedural/institutional arrangements*, *leadership*, *knowledge*, modal sosial, pengetahuan, *resources*.

II.2.2 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada dasarnya pembangunan adalah rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya (*sustainable resource*), melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Pembangunan juga mengupayakan pertumbuhan *sosial-ekonomi* untuk mendukung peningkatan kesejahteraan (Soerjani, 2007: 26). Demikian Salahudin (2011:91) menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah tolak ukur utama dalam melihat keberhasilan pembangunan.

Sehingga lebih khusus Keraf (2010:192) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah sebagai upaya untuk mensinkronkan, mensinergikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Dimana gagasan dibalik itu semua adalah pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup harus saling berkaitan erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan

satu dengan yang lainnya. Demikian juga yang disampaikan Key dalam Christanto (2010: 203), menurutnya pembangunan berkelanjutan adalah sebagai proses integrasi lingkungan, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial.

Namun Ife dan Tesorieoro (2014:77) berpendapat lain, dimana konsep keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan menurutnya merupakan dasar bagi perspektif ekologis, yang dikembangkan terutama dari kajian sistem-sistem hayati dan fisik yang mulanya berfokus pada populasi, kelangsungan spesies, polusi, energi dan seterusnya, yang kemudian diterapkan kedalam sistem ekonomi dan sosial.

Lubchenco dalam Indrawan (2007:13) juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan terpadu, berupa pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun masa mendatang tanpa merusak lingkungan keanekaragaman hayati. Kemudian dahuri (2003:318), dan Grumbine dalam Jatna Supriatna (2008:236) menggambarkan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi sebagai pola pengelolaan yang inovatif terhadap suatu kawasan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kemajuan dan pengembangan kebutuhan jangka panjang.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Muslimin (2010: 98), bahwa pembangunan berkelanjutan adalah langkah pembangunan yang disertai dengan kebijaksanaan yang jelas dan tegas untuk tetap memelihara dan mengamankan sumber daya alam untuk kelangsungan pertumbuhan bagi generasi-generasi yang

akan datang. Senada dengan Fauzi & Oxtavianus (2014), bahwa pembangunan berkelanjutan adalah;

dimana aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan. Bahwa seluruh proses perubahan yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, orientasi pengembangan teknologi, arah investasi dan perubahan kelembagaan berada harus dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan (Sahin & Mete, 2016), bahwa Pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai bangunan di atas tiga pilar penting seperti *Social Development*, *Environmental Protection*, dan *Economic Development*, yang memiliki hubungan terkait dan erat satu sama lain. Juga Supriatna (2008:364) berpendapat, bahwa pembangunan berkelanjutan hadir untuk memperbaiki pola pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang cenderung mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara kurang terkendali, tidak merata yang dibarengi dengan tingkat pengrusakan lingkungan secara sistematis, dan hanya mengejar perolehan devisa.

Sedangkan menurut Kates *et.al.* (2005), bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tanpa merusak atau menurunkan sistem lingkungan alam di mana semua manusia bergantung. Selain itu Wuryandari (2015:8) juga berpendapat, bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan hasil kesepakatan internasional yang

pada hakikatnya untuk mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang akan datang.

Menurut Fauzi & Oxtavianus (2014), dalam pembangunan berkelanjutan terkandung dua gagasan penting:

- (a) Gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjatkan kehidupan manusia, dan
- (b) Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan masa depan.

Dengan demikian Menurut Arifin (2001:16), Dalam mensukseskan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis pelestarian alam maka perlu 3 pendekatan:

- 1) Diseminasi tanpa henti tentang keberlanjutan pembangunan ekonomi kepada kaum elit dan masyarakat luas. Sasarannya adalah isu-isu pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi agenda pemikiran para ekonom arus tengah dan perumus kebijakan.
- 2) Menerapkan prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup seperti industri berat dan ringan yang cenderung menimbulkan polusi, dan sektor kehutanan serta pertanian yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam.
- 3) Senantiasa meningkatkan cakupan penelitian dan pengembangan teknologi yang akrab lingkungan hidup pada setiap disiplin ilmu dengan melibatkan

sektor publik dan perusahaan swasta, terutama yang multinasional. Demikian pula sebaliknya para pekerja dan penggiat lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah (NGO) perlu membekali diri dengan meng-update hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah terhadap lingkungan hidup.

II.2.3 Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi termasuk tanah itu sendiri. Maksudnya adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun diluar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian (Suparmoko, 2014).

Abe Ken-ichi dalam Hidayat (2011: 8) mengatakan bahwa sumber daya alam erat kaitannya dengan politik ekologi;

“karena didalamnya terdapat dinamika antara masalah lingkungan, politik ekonomi dan dinamika antara manusia dengan lingkungan, dan antara kelompok bermacam-macam didalam masyarakat dalam skala dari individu pengguna sumber daya lokal, pemerintah, bahkan transnasional secara keseluruhan”.

Sedangkan Supriatna (2008: 361) menjelaskan, bahwa sumber daya alam adalah kekayaan keanekaragaman hayati yang harus dikelola secara lestari dan diperuntukan untuk hajat hidup dan kesejahteraan orang banyak bukan mengakibatkan kesengsaraan manusia.

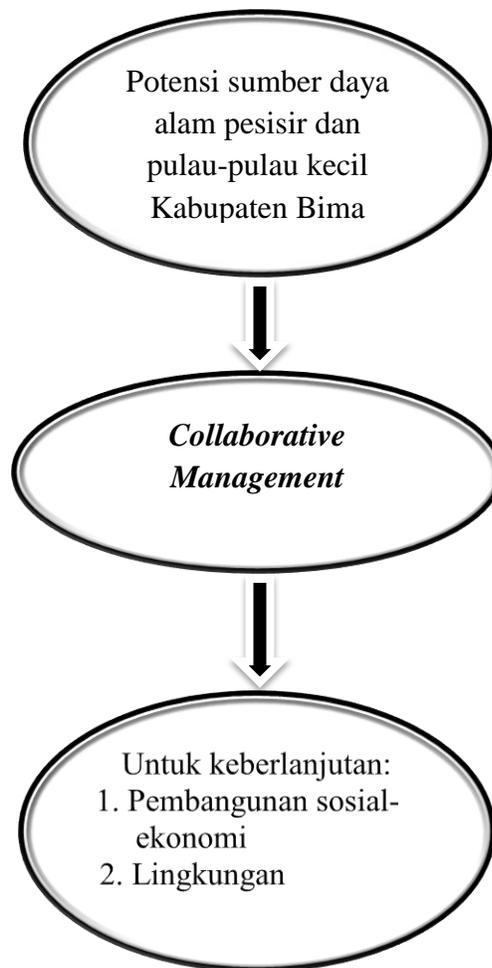
Namun peringatan Klaus (2012:23) dibawah ini seakan menggambarkan bahwa kerusakan sumber daya alam di bumi sudah pada tahap yang sangat akut, oleh karena demikian dibutuhkan langkah-langkah konservasi, pengelolaan lestari untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

“bahwa keadaan lingkungan kita semakin parah, sumber daya alam kita menyusut, dan sumber daya alam itu akan habis, atau akan habis dalam waktu dekat, dan tidak ada, atau mungkin tidak akan ada lagi penggantinya. Namun kapanpun saat itu tiba, kehabisan itu hanya akan menjadi catatan kaki sejarah. Seperti sumber daya alam yang telah banyak hilang sebelumnya”.

II.3 Kerangka Pikir

Mempermudah argument dalam penelitian ini, dibangun dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



II.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penggambaran secara umum tentang konsep atau istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan *collaborative management* adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal melalui kemitraan pengetahuan diberbagai tingkat organisasi. Pemerintah menjembatani dan menyediakan forum untuk interaksi dari berbagai latar belakang pengetahuan, dan koordinasi tugas-tugas lain yang memungkinkan kerjasama, mengembangkan jaringan, mengelola sumber daya, membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik.
2. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan adalah bangunan di atas tiga pilar penting seperti *social development, economic development, and environmental protection*, yang memiliki hubungan terkait dan erat satu sama lain.

II.5 Definisi Operasional

Menurut Bungin (2001:77), dengan definisi operasional maka memberikan kejelasan dan indikator terhadap peneliti sendiri mengenai data apa yang akan dicari, dan memberi petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Maka berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka pikir di atas, adapun indikator proses *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima:

II.5.1 Collaborative Management

Tabel 2.2
Collaborative Management

Variabel	Indikator	Keterangan
<i>Collaborative Management</i>	Membangun kelembagaan (kemitraan dan jaringan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, LSM, Swasta, dan masyarakat sipil. 2. Adanya pemberdayaan dan penguatan Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
	Pembagian kekuasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen untuk saling berbagi peran 2. Adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir
	Pemecahan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya solusi alternatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah 3. Adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat
	Tata kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penegakkan peraturan di Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Adanya keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	Membangun kepercayaan dan modal sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengambilan keputusan secara kolektif. 2. Adanya pembelajaran sosial

II.5.2 Pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.4
Pembangunan berkelanjutan

Variabel	Indikator	Keterangan
Pembangunan berkelanjutan	Aspek sosial-ekonomi	1. Adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan
	Aspek lingkungan	1. Adanya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil